

BAB IV

KESIMPULAN

Australia merupakan negara yang banyak dijadikan sebagai tempat untuk mendapat perlindungan atau mencari kehidupan yang lebih layak oleh para pencari suaka dan pengungsi, karena Australia merupakan negara yang ikut menandatangani perjanjian dengan *United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR)* dan Australia juga ikut meratifikasi *The 1951 Convention relating to the Status of Refugee (1951 Convention)*, sehingga membuat para pengungsi dan pencari suaka beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan hak asasinya dan akan dilindungi di Australia. Namun, pada tahun 2010 atau tepatnya pada saat Julia Gillard menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, terjadi kenaikan jumlah kedatangan imigran melalui jalur laut atau yang dikenal sebagai *Irregular Maritime Arrivals (IMAs)* yakni sebanyak 6.555 orang, sedangkan ditahun sebelumnya hanya sebanyak 2.726 orang.

Pada 25 Juli 2011, Australia dan Malaysia menandatangani kesepakatan *Malaysian Solution* di Kuala Lumpur. *Malaysian solution* merupakan kesepakatan antara Australia dan Malaysia terkait pengungsi dan pencari suaka. Pada prosesnya, Australia akan mengirim 800 orang pencari suaka ke Malaysia sebagai tempat transit selama menunggu status legalitasnya sebagai pengungsi telah disahkan, dan sebagai gantinya Australia akan menerima 4.000 orang pengungsi yang ada di Malaysia untuk masuk dan tinggal di Australia dengan syarat status mereka sebagai pengungsi sudah disahkan dan memiliki dokumen yang lengkap.

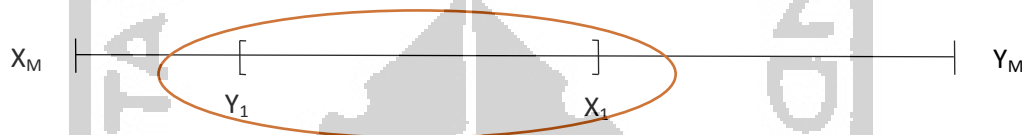
Setiap negara pasti mempunyai cara dan tujuannya masing-masing dalam menghadapi masalah imigran yang tentunya menjadi fokus utama untuk menjaga keamanan perbatasan wilayahnya, seperti Australia. Untuk mempertahankan kepentingannya, Australia mengunjungi Indonesia dan Timor Leste untuk mengajak bekerjasama dalam pelaksanaan kebijakan *Malaysian Solution*, namun tawaran itu langsung ditolak oleh Indonesia dan Timor Leste dengan memajukan kepentingan mereka dalam menjaga keamanan wilayah masing-masing. Penolakan itu tidak membuat Australia berhenti untuk tetap menjalankan *Malaysian Solution*. Setelah kebijakan tersebut sempat dijalankan, Indonesia dan Timor Leste malah semakin mengkritik Australia, bahkan Malaysia yang bersedia menerima ajakan Australia dan membantu Australia dengan menjadi tempat transitpun ikut menerima kritikan keras dari berbagai pihak internasional maupun dalam negerinya.

Dalam hal ini, penulis menggunakan *Two-Level Games Theory* untuk menganalisis kegagalan kebijakan *Malaysian Solution*. Pada teori tersebut, terdapat dua level yaitu Internasional dan Domestik. Dalam kasus ini, penulis memetakan kepentingan setiap pihak dengan variable X sebagai Australia, dan variable Y sebagai Indonesia dan Timor Leste. Untuk memetakan kepentingan masing-masing pihak, penulis merumuskan bahwa X_1 adalah kepentingan minimum Australia yaitu ingin mengatasi masalah penyelundupan dan perdagangan manusia dengan cara *Malaysian Solution*, dan X_m adalah kepentingan maksimum Australia yaitu ingin mengatasi masalah *IMAs* yang terus meningkat di wilayah perbatasan Australia, serta memastikan bahwa orang-orang yang datang melalui jalur laut tersebut telah sah statusnya sebagai pengungsi

setelah menjalani pemrosesan di Malaysia dalam kesepakatan *Malaysian Solution*, sementara Y_m adalah kepentingan maksimum Indonesia dan Timor Leste yang ingin menggagalkan perjanjian *Malaysian Solution* dengan menolak untuk memberikan dukungan kepada Australia.

Berikut merupakan gambar pemetaan *Win-Set* pada kasus kegagalan kebijakan *Malaysian Solution* menggunakan *Two-level Games Theory*:

Win-Set A:



Gambar 4. 1 Win-Set A

Pada tahun 2010, Menteri Imigrasi Australia Chris Bowen mengunjungi Indonesia dan Timor Leste untuk membicarakan masalah penyelundupan manusia dan keamanan perbatasan. Pada gambar di atas, Y_1 dan X_1 merupakan kepentingan minimum dari kedua pihak, yakni Australia (X) serta Indonesia dan Timor Leste (Y) sama-sama ingin mengatasi masalah *asylum seeker* dan *human trafficking* di wilayah perbatasannya. 11 Oktober 2010

Win-Set B:

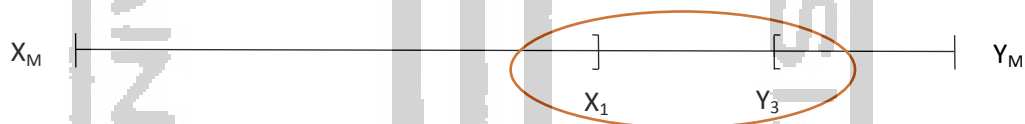


Gambar 4. 2 Win-Set B

Pada gambar di atas, dengan tetap mempertahankan kepentingannya (X_1), pada tahun 2011 Australia (X) mengajak Indonesia dan Timor Leste (Y) untuk

ikut membantu kelancaran kebijakan *Malaysian Solution*. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebijakan *Malaysian Solution* yang diajukan Australia. Indonesia dan Timor Leste menolak untuk mendukung kebijakan tersebut (Y₂). Jika menurut Australia kebijakan tersebut dapat membantu mengatasi masalah perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di kawasan regional, Indonesia dan Timor Leste lebih melihat bahwa kebijakan tersebut membahayakan para pencari suaka yang harus berlayar cukup lama untuk sampai ke Malaysia dari Australia, belum lagi jika ada kapal-kapal yang terdampar di wilayah Indonesia dan Timor Leste, dengan alasan kemanusiaan kedua negara itu harus membantu menyelamatkan pencari suaka yang terdampar dan bertanggungjawab atas kehidupan pencari suaka selama berada diwilayahnya.

Win-Set C:



Gambar 4. 3 Win-Set C

Pada gambar di atas, di tahun 2011 Indonesia dan Timor Leste tetap mempertahankan penolakannya dan memajukannya menjadi Y₃, kedua negara tersebut mengkritik keras kebijakan *Malaysian Solution* yang diajukan Perdana Menteri Julia Gillard. Kritik dan penolakanpun tidak hanya datang dari Indonesia dan Timor Leste, tapi juga dari UNHCR, *Amnesty International*, pihak dalam negeri Australia, bahkan pihak dalam negeri Malaysia (*Malaysia non-state actor*)

juga ikut mengkritik kebijakan tersebut. Hal itu yang menyebabkan Malaysia tidak memajukan kepentingannya dan masih berada di X₁.

Tabel 4. 1 *Win-Set*

Win-set	X	Y	Hasil
Win-set A	X ₁ : Karena banyaknya IMAs yang masuk ke wilayah perbatasan Australia, maka Australia ingin menjalankan kebijakan <i>Malaysian Solution</i> .	Y ₁ : Karena banyaknya isu perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di kawasan Asia Tenggara.	Kebijakan Malaysian Solution terlaksana (2010) X ₁ dan Y ₁ masih saling dapat mengakomodasi, menunjukkan kepentingan minimum masing-masing pihak.
Win-set B	X ₁ : Australia mengajak Indonesia dan Timor Leste untuk ikut membantu melancarkan proses <i>Malaysian Solution</i> .	Y ₂ : Indonesia dan Timor Leste menolak kebijakan tersebut karena alasan kemanusiaan dan tidak menguntungkan bagi keduanya.	Kebijakan Malaysian Solution terlaksana (2011) X ₁ dan Y ₂ masih saling dapat mengakomodasi, meskipun pihak Y semakin mengoptimalkan kepentingan melalui Y ₂ .
Win-set C	X ₁ : Australia tetap menjalankan kebijakan <i>Malaysian Solution</i> karena IMAs di perbatasannya sudah semakin banyak.	Y ₃ : Indonesia dan Timor Leste mempertahankan kepentingannya dengan tetap menolak kebijakan tersebut, dan mengkritik keras Australia karena dianggap tidak menepati perjanjian dengan UNHCR yang telah ditandatangani, serta tidak dapat memenuhi tanggungjawab sebagai pihak yang ikut meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Kritikan juga datang dari berbagai pihak internasional bahkan pihak domestik Australia dan domestik Malaysia sendiri. Australia dianggap	Kebijakan Malaysian Solution dibatalkan (2011) X ₁ dan Y ₃ tidak dapat diakomodir, mengakibatkan pembatalan kebijakan oleh pihak X.

		tidak dapat menjadikan Malaysia sebagai mitra terkait isu tersebut karena Malaysia bukan pihak yang ikut menandatangani UNHCR dan tidak bisa berkomitmen untuk memberikan kehidupan yang layak kepada para pencari suaka selama berada di Malaysia.	
--	--	---	--

Secara garis besar, Putnam menjelaskan bahwa *Two-level Games Theory* terdiri dari dua ranah, yaitu ranah internasional dan ranah domestik. Pada teori ini juga terdapat tiga faktor penting dalam menentukan kemenangan atau yang disebut dengan *Win-Set* di masing-masing ranah. Pada ranah pertama, atau yang dikenal sebagai level internasional terdapat faktor strategi negosiasi, sedangkan pada ranah kedua atau ranah domestik, terdapat faktor distribusi kekuasaan dan koalisi serta institusi kelembagaan.

Pada level internasional, pemerintah Australia mengutus Menteri Imigrasi Chris Bowen untuk berkunjung ke negara-negara yang dianggap strategis dan bisa untuk membantu Australia dalam menjalankan *Malaysian Solution*, yakni Indonesia dan Timor Leste. Pada level ini Menteri Chris Bowen gagal mengajak Indonesia dan Timor Leste untuk mendukung dan membantu proses berjalannya kebijakan *Malaysian Solution*. Sedangkan pada level domestik, pemerintah Australia kembali gagal dalam faktor distribusi kekuasaan dan koalisi, dikatakan gagal karena pemerintah Australia gagal meyakinkan pihak koalisi dan oposisi bahwa kebijakan *Malaysian Solution* dapat menjaga perbatasan dari perdagangan manusia dan kriminalitas lainnya. Selanjutnya pada faktor institusi kelembagaan,

pemerintah Australia juga kembali gagal karena terus mendapat kritikan keras dari berbagai pihak internasional maupun dalam negeri, terutama dari *High Court* Australia, sehingga kesepakatan tersebut tidak dapat disahkan. Ditambah lagi Australia terus mendapat kritikan keras dari pihak internasional terutama UNHCR, karena Australia dinilai tidak menepati dan menjalankan perjanjian yang telah ditandatangani bersama UNHCR, hingga pada akhirnya Perdana Menteri Julia Gillard mencabut kebijakan *Malaysian Solution* dan membuka kembali *camp-camp* pemrosesan lepas pantai di Nauru dan Papua Nugini.

